

## Jangan Biarkan KKN Membudaya di KKR ✓

**KUBU RAYA**-Kabupaten Kubu Raya yang baru berjalan tiga tahun ini, memang banyak menuai pujian dari sejumlah pihak. Di mana hampir disetiap sudut daerahnya terlaksana pembangunan maupun rehap, baik itu terhadap infrastruktur jalan, lembaga pendidikan (sekolah), sarana kesehatan, Irigasi dan sebagainya. Sayangnya keberhasilan tersebut akhir-akhir ini terusik dengan adanya temuan BPK RI terkait indikasi penyimpangan uang rakyat di tubuh Pemkab Kubu Raya yang diduga dilakukan beberapa instansi. Dampaknya, karuan menimbulkan banyak pendapat dan keresahan di berbagai kalangan masyarakat, yang tentunya berdampak kepada nasib dan masa depan Kabupaten yang baru seumur jagung ini.

Menurut Helmi Umar, SH, Pengamat Hukum KKR, fenomena ini bisa menimbulkan aspek positif dan negatif. Aspek positif, yakni sebagai upaya kontrol yang mengarah kepada instropeksi diri bagi pemimpin di Kabupaten Kubu Raya sehingga dengan kejadian tersebut dapat segera mengambil langkah perbaikan manajemen birokrasi, bahkan bisa juga secara tegas mengganti elemen yang sudah tua (usang) atau meresufle anggota SKPD yang terbukti korup.

Selain itu Bupati sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan juga harus bisa selektif dalam menetapkan SKPD



Helmi Umar, SH

yang betul-betul layak dan profesional dibidangnya, baik secara struktural, kepangkatan maupun skillnya. Dengan langkah tersebut Helmi yakin KKR tidak akan hacur berderai oleh kepentingan pribadi dalam usaha untuk memperkaya diri. Yang tidak kalah penting pemimpin juga harus bisa berjiwa besar dalam menerima dan bekerja sama dengan baik di dalam menjalankan roda pemerintahan terjadap jajarannya yang secara Hukum telah di tetapkan sebagai elemen yang tidak terpisahkan, sehingga dapat jalinan komunikasi dan koordinasi yang baik guna memperlancar proses pembangunan.

Apabila yang berlaku sebaliknya, mustahil pembangunan akan berjalan dengan baik. Contoh sederhana adalah dalam satu keluarga apabila terjadi perselisihan pendapat antara kakak dan adik, tentu rumah tersebut tidak akan

menghasilkan kebahagiaan dan ketenangan yang harmonis karena sudah pasti setiap hari hidup dalam ketidaknyamanan. Disini dibutuhkan kebijakan orang tua dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Ini dapat menjadi kacau apabila perselisihan antara Kakak dan Adik tersebut ada yang sengaja memprovokasi, hingga dapat memperburuk keadaan. Oleh Karena itu dalam kaitan ini Gubernur sebagai Bapak harus mampu secara bijak dan adil menyelesaikan

*Bersambung ke halaman.....8*

### Jangan Biarkan KKN Membudaya.....dari hal 9 ✓

hubungan yang diantara anak-anaknya. Seperti halnya isu yang berkembang saat ini, yaitu antara Bupati, Wakil dan Sekda KKR. "Jangan pula sang Bapak hanya memihak satu sisi pihak saja, musthail hubungan ini akan berjalan dengan baik," tuturnya.

Aspek negatif terhadap temuan BPK RI adalah berpengaruh kepada kewibawaan supremasi Hukum di lingkup Pemkab Kubu Raya, jika temuan tersebut terbukti dan tidak ditindak lanjuti secara serius oleh para Penegak Hukum dalam menangani temuan tersebut. Hal ini pasti berdampak kepada mosi tak percaya masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya di Kabupaten Kubu Raya yang pada akhirnya akan tercipta budaya KKN di mana-mana. (cai)